

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi saat ini, kita adalah sebuah negara yang termasuk negara berkembang dengan sektor perekonomian yang memiliki potensi untuk tumbuh. Dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat maka salah satu faktor yang mendorong adanya perkembangan dalam perekonomian di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan adanya banyak perusahaan maka hal ini diikuti dengan persaingan antar perusahaan yang dituntut untuk menerapkan strategi bisnis yang baik agar setiap perusahaan dapat mencapai tujuannya yaitu dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Pada 1 Februari 2019 BEI resmi menerbitkan indeks baru dengan nama IDX80. Indeks IDX80 merupakan indeks yang terdiri dari 80 saham perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik (www.idx.id). Indeks IDX80 menjadi indeks populer di awal fase penerbitannya, karena investor lebih memilih saham dengan fundamental dan prospek yang baik serta saham likuid.

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham (Sujoko dan Soebinto, 2013:131). Saat harga saham naik investor akan menilai perusahaan tersebut sukses melakukan usahanya, akibatnya investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Nilai suatu perusahaan sangat

berarti bagi perusahaan karena memiliki nilai perusahaan dapat memaksimalkan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Kemampuan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan yang mejadi hal penting karena akan menjadi bahan pertimbangan para investor untuk menginvestasikan dananya ke perusahaan tersebut.

Tabel 1.1
Kapitalisasi Pasar

No	Tahun	Kapitalisasi Pasar (dalam jutaan rupiah)
1	2019	5.318.432.813
2	2020	4.556.120.801
3	2021	4.948.804.443
4	2022	5.441.131.710

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pada nilai kapitalisasi pasar Indeks IDX80 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ketahun, namun pada tahun 2020 kapitalisasi pasar mengalami penurunan. Penurunan kapitalisasi pasar diakibatkan terjadinya penurunan harga saham pada indeks IDX80. Naik turunnya harga saham dipengaruhi oleh permintaan terhadap saham tersebut. Perusahaan yang mempunyai kapitalisasi pasar yang besar akan menjadi sasaran para investor untuk melakukan investasi jangka waktu yang panjang karena potensi perkembangan perusahaan yang tinggi dan memiliki risiko tertentu.

Nilai perusahaan sangat penting karena digunakan untuk mengetahui keadaan serta kondisi suatu perusahaan. Dengan adanya peningkatan nilai perusahaan, maka diikuti dengan adanya suatu peningkatan harga saham yang juga dapat mencerminkan adanya suatu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan para pemegang saham dan dapat menarik calon investor untuk

memberikan investasi kepada perusahaan tersebut. Harga saham yang tinggi menunjukkan nilai perusahaan yang tinggi. Sehingga memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting karena dapat mensejahterakan pemilik saham sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai sesuai harapan.

Good corporate governance adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha (Kusmayadi, 2015:8). *Good corporate governance* timbul karena kepentingan perusahaan untuk memastikan kepada pihak investor bahwa dana yang ditanamkan tepat dan efisien. Selain itu dengan adanya *good corporate governance*, perusahaan memberikan kepastian bahwa *agent* bertindak sebaik mungkin demi kepentingan perusahaan.

Adapun tujuan penerapan *good corporate governance* di suatu perusahaan adalah sebagai berikut, yaitu untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil dan dapat dipertanggungjawabkan serta mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *stakeholder* (Kusmayadi, 2015:16).

Nilai perusahaan dapat dikatakan baik jika tata kelola perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik, guna mendapatkan pengelolaan perusahaan yang baik maka perusahaan harus menerapkan *good corporate governance*. Penerapan *good corporate governance* yang baik akan dapat meningkatkan keuntungan di perusahaan, mengurangi resiko kerugian di masa depan serta

dapat meningkatkan nilai bisnis di suatu perusahaan. Semula, keberadaan *good corporate governance* dilatarbelakangi oleh permasalahan keuangan yang terjadi pada perusahaan-perusahaan di berbagai negara maju. Seiring berkembangnya bisnis di berbagai negara, *good corporate governance* berkembang di negara lain, seperti negara berkembang salah satunya Indonesia.

Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh institusi seperti pemerintah, perusahaan asing dan lembaga keuangan (Pasaribu, 2016:156). Kepemilikan institusional kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan tersebut. Kepemilikan institusional dapat berupa saham yang dimiliki institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi serta kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan berperan penting dalam meminimalisir konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan para pemegang saham serta mampu memantau manajemen dalam mengelola perusahaan. Penelitian kepemilikan institusional juga dilakukan oleh Widyaningsih (2018), Poluan (2019), Faradilla (2022), Wati (2022) dan Karmilawati (2022), yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian menurut Hidayat (2021) dan Amaliyah (2019) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan hasil penelitian menurut Saputra (2019) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Kepemilikan manajerial merupakan faktor selanjutnya yang mempengaruhi nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan kondisi manajemen memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajemen tersebut juga sekaligus sebagai pemegang saham (Tarigan, 2018:2). Kepemilikan manajerial dapat membantu dalam menghubungkan pihak internal dan pemegang saham dalam mengarahkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Adanya kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik kepentingan antar manajemen dan pemegang saham dan dapat meningkatkan motivasi kepada manajemen untuk bekerja lebih baik lagi untuk meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian kepemilikan manajerial juga dilakukan oleh Perdana (2014), Widyaningsih (2018), Purwaningrum (2022) dan Karmilawati (2022) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suastini, dkk (2016) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Poluan (2019), Yusuf (2020) dan Wati (2022) menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Dewan komisaris juga berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dewan komisaris independen adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG (Kusmayadi, 2018:85). Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan serta tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang

berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan. Peningkatan jumlah dewan komisaris independen juga memiliki manfaat untuk menengahi suatu masalah dengan menyediakan masukan atau nasihat dalam terjadinya konflik antara anggota dengan principal dan agen. Penelitian dewan komisaris independen juga dilakukan oleh Hidayat (2021), Yusuf (2020) dan Wati (2022) menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amaliyah (2019) dan Purwaningrum (2022) menemukan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Faktor lainnya yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu komite audit. Menurut Pasal 1 dalam Peraturan OJK Nomor 55/PJOK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit memegang peranan penting dalam mewujudkan *good corporate governance* karena komite audit mempunyai peran dalam mengawasi jalannya operasional perusahaan. Jumlah komite audit yang semakin banyak akan memberikan kontrol yang baik terhadap proses akuntansi dan keuangan perusahaan yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan akan berdampak pada nilai perusahaan. Penelitian komite audit juga dilakukan oleh Widyaningsih (2018), Amaliyah (2019), Amini (2020) dan Yusuf (2020) menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian Poluan (2019) menemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan

oleh Saputra (2019), Prasetyo (2020) dan Hidayat (2021) menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Dewan direksi merupakan faktor terakhir yang mempengaruhi nilai perusahaan. Menurut Pasal 1 dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dewan direksi bertugas untuk mengelola perusahaan dan membuat kebijakan yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Dewan direksi dalam tugasnya juga melakukan internal kontrol dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Penelitian dewan direksi juga dilakukan oleh Putri (2016), widyaningsih (2018), Amaliyah (2019), dan Purwaningrum (2022) menemukan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian Prasetyo, dkk. (2020) menemukan bahwa dewan direksi berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2017) dan Saputra menemukan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya serta maraknya kasus dan fenomena yang terjadi mengenai *good corporate governance* yang menyebabkan turunnya nilai perusahaan, maka peneliti tertarik untuk mencoba melakukan penelitian dan menguji kembali dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan yang**

Tergabung Dalam Indeks IDX80 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang tergabung dalam Indeks IDX80 di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2022?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang tergabung dalam Indeks IDX80 di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2022?
3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang tergabung dalam Indeks IDX80 di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2022?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang tergabung dalam Indeks IDX80 di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2022?
5. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang tergabung dalam Indeks IDX80 di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh empiris dari variabel kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang tergabung dalam Indeks IDX80 di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2022.
2. Untuk menguji pengaruh empiris dari variabel kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang tergabung dalam Indeks IDX80 di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2022.
3. Untuk menguji pengaruh empiris dari variabel dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang tergabung dalam Indeks IDX80 di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2022.
4. Untuk menguji pengaruh empiris dari variabel komite audit terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang tergabung dalam Indeks IDX80 di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2022.
5. Untuk menguji pengaruh empiris dari variabel dewan direksi terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang tergabung dalam Indeks IDX80 di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang terkait, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta memberikan referensi dan sumber bacaan untuk peneliti lain khususnya mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap nilai perusahaan.

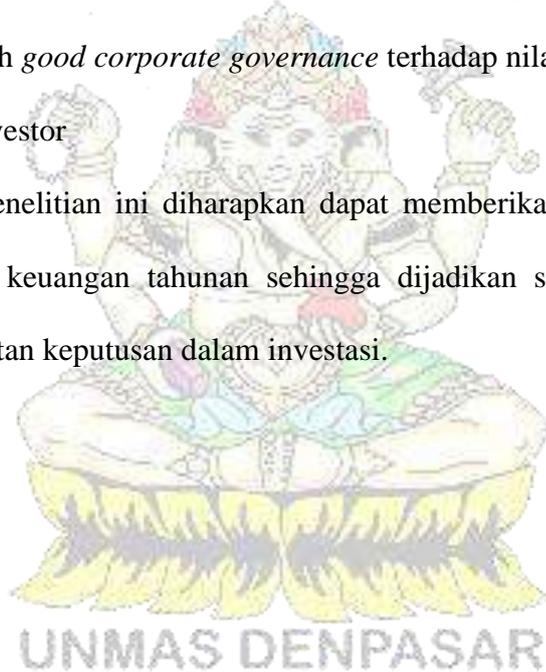
2. Manfaat Praktis

a. Bagi pihak perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan.

b. Bagi investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang laporan keuangan tahunan sehingga dijadikan sebagai acuan untuk pembuatan keputusan dalam investasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan menggambarkan hubungan antara pihak manajemen (*agent*) sebagai pengelola atau pengambil keputusan keuangan dan pemegang saham (*principals*) sebagai pemilik perusahaan. Teori keagenan ini pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Mackling pada tahun 1976, yang mendefinisikan bahwa hubungan keagenan dimana pihak *principal* mempekerjakan *agent* untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Menurut Brigham & Houston (2006:26-31), para manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan yaitu pemegang saham untuk membuat keputusan dimana hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori keagenan (*agency theory*). Hubungan keagenan adalah kesepakatan antara manajer (*agent*) dan investor (*prinsipal*).

Menurut Scott (2015:358), teori keagenan merupakan cabang dari *gametheory* yang mempelajari skema dari kontrak untuk memotivasi agen yang rasional untuk bertindak sesuai keinginan dari *principal*. Konsep teori keagenan menurut Supriyono (2018:63), teori keagenan merupakan hubungan kontraktual antara *principal* dan agen. Hubungan keagenan terjadi ketika seseorang atau lebih mempekerjakan orang atau organisasi lain untuk melakukan serangkaian layanan dan mendelegasikan wewenang

pengambilan keputusan kepada manajer. Para manajer ini adalah seorang profesional yang mengarahkan bisnis dan mengambil alih kegiatan perusahaan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Hubungan antara *principal* dengan *agency* dapat mengarah kepada kondisi ketidakseimbangan informasi. Manajer sebagai pengelola perusahaan mempunyai kewajiban untuk mengetahui informasi yang lebih luas tentang perusahaan baik informasi internal maupun eksternal perusahaan dibandingkan dengan *stakeholder*. Untuk memahami *good corporate governance*, langkah yang tepat dilakukan adalah dengan memahami teori agensi (*agency theory*). Teori ini memberikan wawasan analisis untuk bisa mengkaji dampak dari hubungan *agent* dengan *principal* ataupun *principal* dengan *principal*.

Hubungan agensi terdapat diantara pemegang saham dan manajer, dan/atau diantara pemegang saham dan kreditur. Manajer-manajer dari perusahaan mungkin membuat keputusan yang bertentangan dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Dalam hal ini, dalam pembuatan keputusan manajer dibantu oleh karyawan. Keputusan-keputusan untuk memperluas bisnis mungkin didorong oleh keinginan manajer untuk membuat divisi mereka sendiri berkembang dengan maksud mendapatkan tanggung jawab dan kompensasi yang lebih besar. Konflik ini disebut dengan konflik keagenan (*agency problem*). *Agency problem* akan terjadi bila proporsi kepemilikan manajer atas saham perusahaan kurang dari 100% sehingga manajer cenderung bertindak untuk mengejar kepentingan dirinya dan tidak berdasar pada pemaksimalan nilai perusahaan dalam pengambilan keputusan pendanaan.

Konflik kepentingan yang terjadi memicu timbulnya biaya agensi antara pengelola perusahaan (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*) berpotensi menimbulkan biaya agensi yaitu:

1. Biaya akibat ketidakefisienan pengelolaan yang dilakukan oleh pihak *agent*.
2. Biaya yang timbul akibat pihak proyek yang tidak sama dengan jika pilihan tersebut dilakukan oleh pemegang saham karena resiko merugi yang tinggi.
3. Biaya yang timbul karena dilakukannya kegiatan monitoring kinerja dan perilaku *agent* oleh *principal*.
4. Biaya yang timbul karena dilakukannya pembatasan-pembatasan bagi kegiatan *agent* oleh *principal*.

2.1.2 Teori Sinyal

Teori sinyal pertama kali diperkenalkan oleh Spence pada tahun 1973 di dalam penelitiannya yang berjudul *Job Market Signaling*, yang mengemukakan bahwa isyarat atau signal memberikan suatu sinyal, pihak pengirim (pemilik informasi) berusaha memberikan potongan informasi relevan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima. Pihak pertama kemudian akan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan pemahamannya terhadap sinyal tersebut. Brigham & Houston (2014:184) menyatakan bahwa, *signalling theory* adalah cara pandang pemegang saham tentang peluang perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan di masa yang akan datang, dimana informasi tersebut diberikan oleh manajemen perusahaan kepada para pemegang saham.

Signalling theory lebih menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Menurut Jogiyanto (2014:392), informasi yang dipublikasikan perusahaan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Menurut Sharpe (1997:211) dan Ivana (2005:16), pengumuman informasi akuntansi memberikan sinyal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa mendatang sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham.

Pada saat informasi atau pemegang saham mendorong mereka berinvestasi dalam perusahaan sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan di masa depan. Dari dorongan perusahaan ini dapat memberikan informasi karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor dan kreditor). Ketika pihak luar kekurangan informasi tentang perusahaan, mereka melindungi diri mereka sendiri dengan menawarkan harga yang sangat rendah kepada perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan dapat mengurangi informasi dengan mengirimkan sinyal ke pihak luar.

Teori sinyal ini berkaitan dengan pengungkapan yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan. Semakin tinggi profit yang diperoleh perusahaan maka nilai perusahaan juga semakin tinggi karena diminati oleh investor. *Sustainability report* digunakan manajer sebagai sinyal profitabilitas perusahaan kepada para investor untuk membantu dan mendukung keberlanjutan dan kompensasi manajemen. perusahaan yang lebih baik akan

semakin terbuka dan transparan dalam melaporkan informasi tentang perusahaannya.

Informasi merupakan salah satu unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, keadaan saat ini maupun keadaan dimasa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Investor memerlukan informasi yang lengkap, akurat, relevan dan tepat waktu sebagai alat analisis yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Jika informasi tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu informasi tersebut telah diterima oleh pasar.

Teori sinyal menjelaskan tentang alasan perusahaan memiliki dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Adanya asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar memberikan dorongan kepada perusahaan untuk memberikan informasi kepada perusahaan lebih banyak mengetahui prospek perusahaan kedepan. Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan mengakibatkan mereka melindungi diri dengan memberikan penilaian yang rendah untuk perusahaan. Dengan berkurangnya adanya informasi asimetri dalam perusahaan, dapat meningkatkan nilai pada perusahaan. Teori sinyal menjelaskan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini dapat berupa informasi

mengenai apa yang sudah dilakukan dalam merealisasikan keinginan pemilik perusahaan.

Tujuan dari adanya teori sinyal adalah diharapkan akan mempengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi sehingga nantinya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Teori sinyal menyatakan bahwa pengeluaran investasi memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan. Perusahaan dengan prospek menguntungkan akan berusaha meyakinkan investor dengan menunjukkan laba perusahaan yang tinggi, yang berarti kemakmuran perusahaan bagus sehingga investor akan tertarik dan merespon positif dan dapat meningkatkan nilai perusahaan.

2.1.3 Good Corporate Governance (GCG)

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak petaruh lainnya (Hamdani, 2018:20). Tata kelola perusahaan yang baik merupakan mekanisme untuk mengatasi masalah keagenan. Masalah keagenan dapat ditelusuri kembali ke perkembangan teori keagenan. Teori keagenan menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Menurut Bank Dunia (*World Bank*), pengertian *good corporate governance* (GCG) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (Effendi, 2016:2). *Forum for Corporate Governance in Indonesia/FCGI* (2001), menjelaskan bahwa *good corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemangku kepentingan pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* merupakan segala peraturan dalam perusahaan yang secara langsung dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan mensejahterakan para pemegang saham tanpa melupakan para *stakeholders* lainnya. *Good corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). *Good corporate governance* yang mengandung lima unsur penting yaitu keadilan, transparansi, pertanggungjawaban, independensi dan akuntabilitas, diharapkan dapat menjadi suatu jalan dalam meminimalisasi potensi-potensi konflik keagenan. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik, diharapkan nilai perusahaan akan dinilai baik oleh investor.

Menurut Hamdani (2018:72-77), prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Berikut uraian prinsip-prinsip GCG yang berlaku secara umum:

a. Transparansi

Prinsip dasar transparansi menunjukkan tindakan perusahaan untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh *stakeholders*. Transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyedia informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan masyarakat. Prinsip transparansi dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

Transparansi merupakan suatu komitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) mengenai keadaan keuangan, pengelolaan dan kepentingan perseroan secara akurat, jelas dan tepat waktu.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip dasar akuntabilitas bagi Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang

berkesinambungan. Akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas yang menjamin tersedianya mekanisme, peran tanggung jawab jajaran manajemen yang profesional atau semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional perseroan.

c. *Responsibilitas (Responsibility)*

Responsibilitas diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Prinsip dasar *responsibilitas*, pada prinsipnya perusahaan harus memenuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Dalam hal ini tanggung jawab mencakup adanya deskripsi yang jelas tentang peranan dari semua pihak dalam mencapai tujuan bersama, termasuk memastikan dipatuhinya peraturan serta nilai-nilai sosial.

d. *Independensi (Independency)*

Pada dasar *independensi (independency)* dalam praktik pelaksanaan GCG bagi perusahaan diharapkan pengelolaan dapat dilakukan secara independen sehingga masing-masing perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. *Independency* merupakan suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak

manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip dasar kewajaran dan kesetaraan dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Prinsip kewajaran dan kesetaraan adalah prinsip yang mengandung unsur keadilan, yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk para pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor serta masyarakat luas. Terlebih keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dari tindakan kecurangan.

Penerapan *good corporate governance*, memiliki banyak manfaat yang dapat diambil oleh perusahaan. Adapun manfaat-manfaat tersebut antara lain yaitu:

- 1) Menurangi *agency cost*, dari konflik yang mungkin ditimbulkan antara principal dan agent.
- 2) Meminimalkan *cost of capital* dengan menciptakan sinyal positif kepada para penyedia modal (investor).
- 3) Meningkatkan citra perusahaan dengan adanya peningkatan nilai saham perusahaan.
- 4) Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholder terhadap perusahaan.

5) Dengan penguatan nilai saham berdampak terhadap meningkatnya nilai perusahaan.

Mekanisme *good corporate governance* yang baik adalah sistem, proses, dan proses yang dirancang untuk memandu dan mengelola perusahaan, untuk mencapai hubungan yang baik, adil dan transparan antara berbagai pihak dan memiliki kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat dalam perusahaan dan seperangkat aturan. Mekanisme *good corporate governance* adalah suatu sistem yang mengatur dan mempertegas kembali hubungan, peran, wewenang dan tanggung jawab antara pemilik atau pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi. Mekanisme *good corporate governance* dalam penelitian ini diproksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit dan dewan direksi. Penerapan mekanisme *good corporate governance* yang baik akan berdampak dengan jalannya perusahaan yang akan berpengaruh kinerja dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan.

2.1.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan investasi saham yang dimiliki oleh institusi lain seperti: perusahaan, dana pensiun, reksadana dan lain lain dalam jumlah yang besar (Brigham, 2005:528). Menurut Hery (2017:30) mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai jumlah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya. Institusional mempunyai investasi ekuitas yang cukup besar sehingga investor terdorong untuk mengawasi tindakan dan kinerja manajer lebih ketat. Menurut Ayu

(2016:177), kepemilikan institusional adalah besarnya jumlah kepemilikan saham oleh institusi yang terdapat dalam perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa, kepemilikan institusional adalah kepemilikan ekuitas suatu institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi atau dana pensiun, yang diukur dengan persentase yang dihitung pada akhir tahun.

Dengan adanya kepemilikan institusional suatu perusahaan akan mendorong tingkat pengawas agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi serta memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan yang lebih ketat atas aktivitas yang terjadi dalam perusahaan.

Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar peran kepemilikan institusional tersebut dalam mekanisme *good corporate governance* sehingga aspek pengawasan terhadap kinerja akan semakin meningkat. Pengawasan atau monitoring yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Kepemilikan institusional diukur dengan persentase kepemilikan saham oleh institusi seperti perbankan, perusahaan asuransi, dana pensiun, reksadana dan institusi lain dibagi dengan jumlah saham beredar.

2.1.5 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial (*managerial ownership*) adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan

keputusan di dalam perusahaan, misalnya direktur dan komisaris (Majid, 2016:4). Menurut Terry dan Rue (2010:1) kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara efektif ikut dalam pengambilan keputusan, diukur oleh proporsi saham yang dimiliki manajemen pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persentase. Menurut Hanafi (2014:75) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah besarnya kepemilikan saham oleh pihak manajemen juga sebagai pemegang saham yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Kepemilikan saham oleh manajemen ini penting di dalam menerapkan *good corporate governance* agar terciptanya hubungan yang kondusif antara pemegang saham dan manajer. Hal ini karena kepemilikan manajerial dapat mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham sehingga dapat mengatasi masalah agensi di dalam perusahaan.

Struktur kepemilikan manajerial dapat dikemukakan melalui dua sudut pandang yaitu pendekatan keagenan dan pendekatan ketidakseimbangan. Pendekatan keagenan meyakini bahwa kepemilikan manajerial berguna untuk menekan konflik keagenan yang timbul dalam suatu perusahaan. Sedangkan dalam pendekatan ketidakseimbangan informasi antara insider dan outsider melalui pengungkapan informasi di dalam perusahaan.

Kepemilikan manajerial berperan sebagai pihak yang menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham karena proporsi saham yang dimiliki manajer dan direksi mengindikasikan menurunnya kecenderungan adanya tindakan manipulasi oleh manajemen. Kepemilikan

manajerial akan mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan, karena juga memiliki perusahaan. Hak ini akan berdampak jika kinerja perusahaan meningkat maka nilai perusahaan juga akan meningkat. Jadi dapat disimpulkan, kepemilikan manajerial adalah jumlah proporsi saham yang dimiliki oleh para manajemen yang diukur dari persentase jumlah saham manajemen.

2.1.6 Dewan Komisaris Independen

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi sesuai kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Menurut Tunggal (2009:79), mengungkapkan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), menyatakan bahwa, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi untuk memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan praktik *good corporate governance* (GCG). KNKG memisahkan dewan komisaris menjadi 2, dewan komisaris independen dan dewan komisaris non-independen. Penelitian ini berfokus pada dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen,

anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham mayoritas, serta bebas dari hubungan bisnis dan/atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2006).

Dewan komisaris memegang peranan penting dalam perusahaan terutama dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus mempunyai komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas. Menurut *Forum for Corporate Governance Indonesia* (FCGI) persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari anggota dewan komisaris. Adapun kriteria lain mengenai komisaris independen yaitu sebagai berikut:

- a) Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali.
- b) Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur atau komisaris lain di perusahaan.
- c) Komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan.
- d) Komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- e) Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dan RUPS.

2.1.7 Komite Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /PJOK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Menurut Ikatan Komite Audit (IKAI) menyatakan bahwa, komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan direksi dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

Menurut Bapepam Nomor Kep-29/M/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Adanya komite audit akan mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadai sebagai prinsip dan tanggung jawab dari komite audit. Tugas pokok dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Komite audit juga berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor.

Keanggotaan komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Keanggotaan komite audit terdiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar dari emiten

atau perusahaan publik. Adapun syarat-syarat menjadi anggota komite audit menurut *Forum for Corporate Governance* sebagai berikut:

- a) Komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris.
- b) Terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya satu orang anggota berasal dari emiten atau perusahaan public.
- c) Memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai latar belakang pendidikan serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- d) Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
- e) Bukan merupakan orang dalam KAP yang memberikan jasa audit dan/atau non-audit pada emiten atau perusahaan public yang bersangkutan dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat oleh komisaris sebagaimana dimaksud dalam peraturan VIII.A.2 tentang independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal.
- f) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.
- g) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten, komisaris, direktur atau pemegang saham utama.
- h) Tidak merangkap sebagai anggota komite audit pada emiten atau perusahaan public lain pada periode yang sama.
- i) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten.

Jika kualitas dan karakteristik komite audit tercapai, maka transparansi pertanggungjawaban manajemen perusahaan dapat dipercaya, sehingga akan meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar modal. Hal ini akan membuktikan bahwa keberadaan komite audit dapat meningkatkan efektivitas perusahaan.

2.1.8 Dewan Direksi

Kumpulan-kumpulan direktur yang dipilih dengan sepengetahuan presiden direktur dikenal dengan dewan direksi. Dewan direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Zarkasyi, 2018:75). Dewan direksi berperan penting sebagai agen sekaligus pengelola perusahaan serta bertanggung jawab sebagai operasional perusahaan. Dewan direksi mempunyai tugas untuk meyakinkan bahwa manager bertindak menurut kepentingan pemegang saham. Yang mempunyai kewajiban sebagai dewan direksi pada dewan komisaris dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan serta memberikan informasi yang diketahuinya.

Dewan direksi dalam suatu perusahaan berperan sebagai agent atau pengelola perusahaan yang kedudukannya bertanggungjawab secara penuh atas kegiatan operasional perusahaan (Effendi, 2016:26). Menurut peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 33/PJOK.04/2014 berisikan direksi adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas kepentingan perusahaan, sesuai dengan tujuan

serta mewakili perusahaan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Fungsi, wewenang dan tanggung jawab direksi diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas. Dewan direksi memiliki tugas antara lain:

- a. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan
- b. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas karyawan dan kepala bagian (manajer)
- c. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan
- d. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan

2.1.9 Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan manajer dalam mengelola sumber daya perusahaan yang dipercayakan kepadanya yang sering dihubungkan dengan harga saham (Sugeng, 2017:9). Menurut Harmono (2017:233), nilai perusahaan adalah kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran pasar modal. Menurut Kasmir (2011:6), nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting bagi suatu perusahaan, karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan utama perusahaan. Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi, yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya, karena

dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat. Jadi dapat disimpulkan, nilai perusahaan dapat didefinisikan sebagai nilai wajar perusahaan yang menggambarkan persepsi investor terhadap emiten bersangkutan. Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting bagi suatu perusahaan, karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan utama perusahaan.

Nilai perusahaan mencerminkan dari ekuitas dan nilai buku perusahaan, baik berupa nilai pasar ekuitas, nilai buku dari total utang dan nilai buku dari total ekuitas. Salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk menilai perusahaan adalah dengan menggunakan *Price to Book Value* (PBV). *Price to Book Value* (PBV) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada manajemen dan organisasi sebagai perusahaan yang terus berkembang. Semakin tinggi nilai rasio PBV artinya pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. Semakin tinggi rasio PBV maka semakin tinggi penilaian investor dibandingkan dengan dana yang ditanamkan dalam perusahaan, sehingga semakin besar pula peluang bagi para investor untuk membeli saham perusahaan tersebut.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

1. Penelitian yang dilakukan oleh Poluan dan Aditya (2019), yang berjudul “Pengaruh Pengungkapan *Good Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017”. Variabel independen dalam

penelitian ini yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah variabel kepemilikan institusional dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Variabel Komite Audit dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan 2 variabel lain yaitu kepemilikan manajerial dan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Purwaningrum (2022) dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Nilai Perusahaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Partial Least Square (PLS)*. Hasil dari penelitian ini adalah kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, dkk.,(2021), dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan”. Variabel independen dalam

penelitian ini adalah dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan ROE, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah secara parsial, dewan komisaris independen dan ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, komite audit tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, Secara simultan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan ROE berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Wati, dkk., (2022), dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2017-2019”. Variabel independen dari penelitian ini adalah dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kinerja keuangan, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah dewan komisaris, kepemilikan institusional berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Sedangkan kepemilikan manajerial dan kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani, dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan, *Good Corporate Governance*,

dan *Leverage* terhadap Nilai Perusahaan”. Variabel independen dari penelitian ini adalah kinerja keuangan, GCG dan leverage, sedangkan variabel dependen dari penelitian ini adalah nilai perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dari penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil dari penelitiannya adalah terdapat dampak positif dan tidak signifikan dari kinerja keuangan, *Good Corporate Governance* dan leverage terhadap nilai perusahaan pada perusahaan-perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo, dkk., (2020) yang berjudul “Penerapan *Good Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah komisaris independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan institusional dan kinerja keuangan, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan ROE tidak berdampak terhadap nilai perusahaan. Dewan direksi berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra, dkk., (2019) yang berjudul “Implementasi *Good Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah

kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, dewan direksi, komisaris independen dan komite audit secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan Tobin's Q. Dengan adanya implementasi GCG yang baik akan muncul kepercayaan investor sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan secara parsial, variabel kepemilikan pemerintah dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Dan ketiga variabel lainnya yaitu kepemilikan institusional, dewan direksi dan komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

8. Penelitian yang dilakukan Saputra (2017) yang berjudul "Analisis Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Earning Management terhadap Nilai Perusahaan". Hasil dari penelitian ini menunjukkan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Earning management tidak terbukti berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.
9. Penelitian yang dilakukan Amini (2020) yang berjudul "Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja

Keuangan Sebagai Variabel *Intervening*". Variabel independen dalam penelitian ini adalah dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Variabel *intervening* dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, Komite Audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dewan direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Karmilawati (2022) yang berjudul "Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan". Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan *Corporate Social Responsibility*, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan variabel independen seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit dan dewan direksi. Selain itu penelitian sebelumnya juga menggunakan variabel dependen yang sama yaitu nilai perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya adalah terletak pada beberapa variabel yang digunakan berbeda, objek penelitian, lokasi penelitian dan tahun penelitian yang dilakukan berbeda. Adapun ringkasan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 1.1 Lampiran 1.

